

PROSPEK DAN STRATEGI SISTEM PENDIDIKAN PESANTREN PADA ERA OTONOMI DAERAH

Naufal Ramzy

Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Sumenep
Pondok Pesantren Al-Amien Jl. Raya Prenduan Sumenep
email: naufal_ramzy@yahoo.co.id

Abstrak:

Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tradisional yang mempelajari, memahami, mendalami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pada urgensi moral-keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari. Lembaga pesantren telah hidup dan eksis sejak ratusan tahun yang lalu, sehingga identik dengan budaya pendidikan hampir mayoritas umat Islam Indonesia khususnya yang berdomisili di desa. Salah satu strategi yang bisa digunakan pada sistem pendidikan pesantren adalah menggunakan metode *SWOT (Strength – Weakness – Opportunities – Threat)* sebagai upaya menghasilkan temuan yang realistis untuk ditindaklanjuti. Pendidikan pesantren juga sangat membutuhkan kejujuran para pengelola dan *stakeholder*. Metode *SWOT* bisa menjadi teropong dalam membedah secara transparan dan jujur keberadaan lembaga Pesantren apa adanya.

Abstract:

Pesantren is a traditional Islamic educational institutions to learn, understand, explore, appreciate, and practice the teachings of Islam emphasizing on moral-religious value as everyday behavior guidance. Boarding institutions have existed since hundreds of years ago that it is almost identical to the cultural education of the Muslim majority in Indonesia, especially those residing in the village. The strategy used in pesantren education system is *SWOT (Strength - Weakness - Opportunities - Threat)* as an effort to produce a realistic findings for further action. *SWOT* analysis can be used to see transparently and the truly condition of the institution.

Kata Kunci:

Pendidikan Pesantren, SBM, *SWOT*, Matra *Plus-Minus*

Pendahuluan

Bangsa Indonesia akan mencapai kemajuan yang spektakuler manakala sektor pendidikan dibangun dan dikelola secara serius dan profesional. Ide-ide baru mengenai konsep pendidikan alternatif yang *feasible* sangat dibutuhkan, mengingat mutu pendidikan negeri ini dirasakan semakin menurun.

Sektor pendidikan yang dihadapi dewasa ini kalau dilihat dari dimensi fungsional pedagogis terdapat dua problem utama¹, yaitu: *pertama*, bagaimana mempersiapkan generasi

¹Mochtar Buchori, "Pendidikan Islam di Indonesia: Problema Masa Kini dan Perspektif Masa Depan" *PRISMA*, No. 5 Tahun XVIII (1989), hlm. 77 – 78.

muda Indonesia supaya mereka memiliki kemampuan menjawab tantangan apa pun yang dihadapi secara memadai di masa depan. *Kedua*, perluasan sistem, yaitu menambah daya tampung sistem sehingga sistem pendidikan di Indonesia tidak hanya mampu melayani anak-anak usia sekolah melalui sistem pendidikan formal, melainkan mampu juga melayani masyarakat luas melalui sistem pendidikan non-formal.

Aktivis LSM sejak dasawarsa 1980-an tidak sedikit yang mulai serius melirik sistem pendidikan Islam model pesantren sebagai contoh yang dipandang potensial untuk menemukan konsep baru pendidikan alternatif di Indonesia. Dimensi yang patut diperhatikan di dalam sistem pendidikan pesantren adalah peranannya sebagai instrumen transformasi budaya yang menyeluruh dalam kehidupan masyarakat, khususnya di sektor pendidikan non-formal²

Lembaga pendidikan pesantren secara historis mulai dibentuk oleh masyarakat Islam (komunitas yang berpredikat santri) di sejumlah kawasan pantai Sumatera dan Jawa pada abad ke-14. Hal itu terus meluas ke pedalaman daerah-daerah terutama ketika didukung juga oleh aktivitas kependidikan Islam bermodel pengajian. Lembaga pengajian dan pesantren di Jawa pada 1831 berjumlah 1.853 lembaga dan

berkembang menjadi 14.929 lembaga pada 1985.³

Pesantren mulai tumbuh dan berkembang pada saat gerakan pendidikan dan pengajaran di pusat-pusat dunia Islam telah berantakan. Peradaban Islam yang megah pada abad pertengahan yang telah melahirkan para filosof besar seperti al-Ghazâlî, Ibn Rusyd dan Ibn Khaldûn mulai abad ke-14 tak mampu lagi memberikan sumbangan yang berarti dalam dunia ilmu. Masyarakat muslim yang semula menerima wawasan pemikiran bebas yang sangat menghargai budaya berpikir rasional berbalik menjadi masyarakat tertutup (eksklusif) yang mengunci diri dari forum atau wacana dialogis-dialektis, dan bahkan berusaha menutup rapat-rapat pintu ijtihad.

Situasi seperti itulah yang mewarnai pesantren di Indonesia dalam pertumbuhan dan perkembangannya sampai abad ke-19. Keterbatasan sistem pendidikan pesantren dengan situasi yang demikian bisa dimengerti, bahkan seringkali tidak memiliki kurikulum yang jelas, corak pengajaran, dan sistem pendidikan tidak teratur sehingga sering dibelenggu oleh problema stagnasi atau "jalan di tempat".⁴

Kondisi semacam itu mulai berubah drastis pada 1950 semenjak Departemen Agama RI mendirikan sekolah guru dan hakim agama negeri serta PGAN (Pendidikan Guru Agama Negeri) di beberapa karesidenan, yang diikuti dengan didirikannya IAIN (Institut Agama Islam Negeri) pada 1960. Kurikulum di lembaga pendidikan

²M. Nashihin Hasan, "Karakter dan Fungsi Pesantren", dalam Manfred Oepen & Wolfgang Karcher (ed.), *Dinamika Pesantren: Dampak Pesantren dalam Pendidikan dan Pengembangan Masyarakat* (Jakarta: P3M, 1988), hlm. 110 – 111. Lihat pula tulisan K.H.M. Sahal Mahfudz, "Pengembangan Masyarakat oleh Pesantren: Antara Fungsi dan Tantangan", (Pati: Pondok Pesantren Maslakul Huda, 1988), hlm. 98 – 108.

³Zamakhshyari Dhofier, "Transformasi Pendidikan Islam di Indonesia," *PRISMA*, No. 2 Tahun XV (1986), hlm. 23.

⁴Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900 – 1942* (Jakarta: LP3ES, 1980), hlm. 15.

tersebut berimbang antara mata pelajaran agama Islam dan mata pelajaran umum.

Lembaga pendidikan pesantren sejak saat itu tidak sedikit yang mulai mengakomodasi sistem pendidikan modern dengan ciri khas kurikulum visioner dan konseptual, berjenjang klasikal, program pendidikan terjadwal, perencanaan keuangan (SPP dan donatur) yang terukur, dan memberi honorarium yang pantas kepada seluruh guru.⁵

Gambaran Umum Pesantren

Lembaga pendidikan pesantren yang jumlahnya ribuan di penjuru pelosok tanah air tidaklah hendak dibahas secara keseluruhan dalam artikel ini. Setiap lembaga pesantren memiliki keunikannya masing-masing, sehingga cukup sulit untuk menarik kesimpulan yang paripurna-generalistik tentang sosok khas lembaga jenis ini.

Referensi utama penulisan artikel ini adalah riset mengenai dunia pendidikan pesantren yang telah dirampungkan oleh Mastuhu pada 1987. Riset itu merupakan tugas penulisan disertasi S3 di IPB (Institut Pertanian Bogor). Riset tersebut difokuskan di enam lokasi pesantren, yaitu: Pondok Pesantren Annuqayah Guluk-Guluk, Sumenep, Madura; Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, Asembagus, Situbondo; Pondok Pesantren Blokagung, Banyuwangi; Pondok Pesantren Paciran, Lamongan; Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang; dan Pondok Pesantren

Moderen Gontor, Ponorogo. Seluruh lembaga ini berlokasi di kawasan Propinsi Jawa Timur.⁶

Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tradisional yang mempelajari, memahami, mendalami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pada urgensi moral-keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari. Makna tradisional di sini bukan berarti senantiasa tetap tanpa mengalami perubahan dan penyesuaian dengan tuntutan zaman, tetapi bermakna bahwa lembaga ini telah hidup dan eksis sejak ratusan tahun yang lalu (500-600 tahun), sehingga identik dengan budaya pendidikan hampir mayoritas umat Islam Indonesia, khususnya yang berdomisili di desa. Budaya tersebut sangat berpengaruh dalam pembentukan karakter sikap keberagamaan yang implikatif dalam kehidupan sehari-hari.

Unsur-unsur penting yang secara khas terdapat di dalam pesantren adalah: (1) *pelaku*: kiai, ustadz, santri, dan pengurus; (2) *sarana perangkat keras*: masjid, rumah kiai, rumah ustadz, pondok (asrama) santri, gedung sekolah, perpustakaan, kantor pengurus, toko koperasi, dan lain sebagainya; (3) *sarana perangkat lunak*: tujuan, kurikulum, kitab kuning, buku, cara belajar mengajar (*bandongan*, *sorogan*, *halaqah*, menghafal), dan evaluasi belajar mengajar.

Adapun kiai berposisi sebagai tokoh kunci yang menentukan corak kehidupan pesantren. Semua warga atau komunitas pesantren wajib tunduk patuh kepada kiai, berusaha memperoleh restu,

⁵Abdul Munir Mulkhan, *Paradigma Intelektual Muslim: Pengantar Filsafat Pendidikan Islam dan Dakwah* (Yogyakarta: Sypress, 1993), hlm. 244 – 245. Lihat pula A. Naufal Ramzy, "Menggagas Peran Strategis Pondok Pesantren Dalam Era Modernisasi", dalam A. Naufal Ramzy (ed.) *Islam dan Transformasi Sosial Budaya*, Cetakan Pertama (Jakarta: Deviri Ganan, 1993), hlm. 111-123.

⁶Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren: Suatu Kajian Tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren* (Jakarta: INIS, 1994), hlm. 1–214. Buku ini salah satu rujukan yang cukup standar untuk memahami tradisi pendidikan pesantren.

dan perkenannya dalam setiap tindakan apa pun.

Temuan hasil penelitian Mastuhu⁷ tentang pesantren menyatakan, bahwa lembaga pesantren memiliki tiga fungsi yang urgen, yaitu: *pertama*, sebagai lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal (madrasah, sekolah umum dan perguruan tinggi) dan pendidikan non-formal yang secara khusus mengajarkan agama dalam perspektif pikiran ulama fiqh, Hadis, tafsir, tauhid, dan tasawuf (yang hidup antara abad ke-7 hingga abad ke-13 Masehi).

Kedua, sebagai lembaga sosial yang tidak diskriminatif dalam menampung calon santri, baik yang berasal dari kalangan masyarakat kaya maupun miskin. Lembaga ini juga terbuka untuk masyarakat luas untuk mengkonsultasikan apa pun kepada kiai atau sekadar meminta saran masalah keumatan secara luas.

Ketiga, sebagai lembaga penyiaran agama yang secara periodik menyelenggarakan majlis taklim (pengajian), diskusi keagamaan yang melibatkan masyarakat umum, dan pendelegasian santri-santri terpilih untuk mengisi pengajian keagamaan di luar pesantren atau berdakwah ke daerah yang terpencil.

Ketiga fungsi yang urgen tersebut secara spiritual sangat berperan memperkuat sosialisasi praktik-praktik

⁷Ibid., hlm. 59-61. Bahkan, kini sekian banyak pondok pesantren memperluas fungsi kependidikannya ke level perguruan tinggi dengan membentuk sekolah tinggi atau *ma'had 'aly*. Lihat A. Malthuf Siraj Rasyid, "Ma'had 'Aly Sukorejo: Semangat Akademis di Pesantren Salafiyah", *Majalah Pesantren*, No. 3 Vol.VIII (1991), hlm. 84. Tentang sejauh mana sekian sekolah tinggi itu dikelola secara dinamis tentu sangat memerlukan penelitian lebih lanjut, kalau perlu secara *action research*.

keagamaan, terutama yang berkaitan dengan masalah ibadah *mahdlah* (tatacara komunikasi vertikal dengan Allah SWT). Pengaruh struktural yang muncul selain itu adalah memperkuat peran dan posisi kiai sebagai figur pemimpin yang mempunyai otoritas penuh dalam mengartikulasikan tema-tema ajaran agama.

Metode apakah yang digunakan untuk menyosialisasikan tema-tema ajaran agama pada seluruh santri dan masyarakat luas? Lembaga pendidikan pesantren pada umumnya menggunakan empat macam model didaktik-metodik dalam program pengajarannya, yaitu: *Pertama*, *sorogan*, yaitu belajar secara individual yang dilaksanakan dengan cara seorang santri berhadapan langsung dengan seorang guru sehingga terjadi proses interaksi yang kuat di antara keduanya.

Kedua, *bandongan*, yaitu belajar secara kolektif berkelompok yang diikuti oleh seluruh santri. Biasanya kiai menggunakan bahasa daerah setempat atau Bahasa Indonesia dalam menerjemahkan redaksi kitab-kitab kuning yang dipelajarinya.⁸

Ketiga, *halaqah*, yaitu diskusi untuk memahami isi kitab kuning, bukan untuk mempertanyakan kemungkinan benar atau salah, tetapi justru untuk memahami maksud yang diajarkan dalam kitab kuning itu. Para santri yakin bahwa kiai tidak mungkin akan mengajarkan hal-hal yang salah, sekaligus mereka yakin bahwa isi kitab

⁸Perihal pengaruh besar kitab kuning di pondok pesantren, lihat tulisan K.H. Ali Yafie, "Kitab Kuning, Produk Peradaban Islam" dan tulisan Muhammad Tholhah Hasan, "Metode Pengajian Kitab di Pesantren: Tinjauan Ulang," *Majalah Pesantren*, No. 1 Vol.VI (1989), hlm. 3-11, dan hlm. 29-35.

kuning yang dipelajari telah mengandung kebenaran yang final.

Keempat, hafalan, yaitu kewajiban menghafalkan pelajaran kitab kuning khususnya materi yang berbentuk *nazham* (syair) dengan jumlah syair tertentu yang harus disetor (dihafal) ke hadapan gurunya. Materi hafalan umumnya terfokus pada materi pelajaran ilmu *Nahw Sharraf* (teori tata bahasa Arab) dan ilmu tauhid (ilmu pengesaan Tuhan).

Mengapa fungsi dan metode-metode pengajaran di lembaga pendidikan pesantren masih eksis hingga saat ini? Seluruh komponen atau komunitas pesantren secara faktual masih sangat kuat memegang teguh prinsip sistem pendidikan pesantren. Kegiatan apa pun yang dilakukan harus terkategori ibadah (pengabdian) semata kepada Allah SWT, sehingga sistem pendidikan yang dikembangkan menggunakan pendekatan holistik, dan jika dielaborasi memuat nilai-nilai sebagai berikut:

1. *Theocentric*, yaitu pandangan yang mengatakan bahwa semua kejadian dalam proses sistem pendidikan berasal dan akan kembali pada kebenaran Tuhan.⁹
2. *Sukarela dan mengabdikan*, yakni pilihan yang bertitik tolak dari setiap perilaku dan tindakan dengan sikap mental ikhlas yang hanya berdimensi mengharap ridla (restu) Allah SWT.
3. *Kearifan*, yaitu bersikap sabar, tabah, rendah hati (*tawādhu'*), patuh pada ketentuan hukum agama, mampu mencapai tujuan, dan idealisme tetapi

⁹Prinsip ini untuk mempersiapkan ruhani santri mencapai pengalaman dan sikap hidup transendental sehingga spiritualismenya semakin mantap. Lihat Abdullah Fadjar, *Peradaban dan Pendidikan Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), hlm. 58.

tanpa merugikan orang lain, serta berusaha maksimal agar diri atau keluarga bermanfaat bagi kemas-lahatan umat secara menyeluruh.

4. *Kesederhanaan*, yaitu sikap tidak mengumbar kemewahan dan berlebihan, mampu berpikir dan berperilaku yang wajar (proporsional), serta menghindari sikap tinggi hati (sombong).

5. *Kolektivitas*, bahwa sikap kebersamaan jauh lebih urgen dan lebih strategis dari pada sikap lebih mengedepankan diri sendiri (individualistik).

6. *Mengatur kegiatan bersama*, bahwa usaha mengaplikasikan program apa pun secara kolektif harus diputuskan berdasarkan kesepakatan musyawarah secara aklamasi, dan kalau perlu tanpa melalui *voting*.

7. *Kebebasan terpimpin*, bahwa setiap manusia mempunyai kebebasan mengatur dirinya sendiri, walaupun begitu lembaga pesantren memperlakukan kebebasan dan keterikatan (ketidak-bebasan) sebagai suatu hal yang kodrati yang harus diterima dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya dalam kegiatan belajar-mengajar.

8. *Mandiri*, yaitu sikap bertanggung jawab dalam mengatur dirinya sendiri, tanpa tergantung atau merepotkan orang lain dari sejak bangun tidur hingga tiba waktunya tidur kembali di malam hari¹⁰

¹⁰Sikap mandiri di sini tetap dalam koridor kebebasan terpimpin. Sehingga jika hal ini diterapkan terhadap konteks kebebasan berpikir secara lintas madzhab justru dipandang tabu bahkan dilarang. Jika hal ini dilanggar, pelakunya akan dipandang *mbalelo* dan terancam mitos kualat. Kasus seperti ini sering terjadi di dalam pondok pesantren yang fanatik terhadap satu aliran madzhab saja (biasanya yang bertipe *salafiyah*), dan cenderung tidak toleran terhadap madzhab lain. Mitos kualat itu hingga kini masih cukup mengakar. Catatan ini berdasarkan pengamatan dan pengalaman penulis sendiri.

9. *Pesantren adalah tempat mencari ilmu dan mengabdikan*, yaitu pandangan bahwa mencari ilmu itu wajib hukumnya dan harus diorientasikan untuk mengabdikan pada Allah SWT di mana pun dan kapan pun. Pola berpikir para santri bertitik tolak dari suatu keyakinan dan berakhir (klimaks) pada suatu kepastian, sedangkan kalangan *scientist* (ilmuwan) berangkat dari suatu keraguan (skeptis) dan berakhir pada sebuah pertanyaan.

10. *Mengamalkan ajaran agama*, yaitu suatu pandangan bahwa setiap gerak kehidupan manusia harus selalu berada dalam batas rambu-rambu hukum agama (fiqh). Perbuatan nyata jauh lebih baik dari pada pernyataan dalam bentuk kata-kata semata (*verbalisme*)¹¹

11. *Tanpa ijazah*, bahwa keberhasilan belajar seorang santri bukan terletak pada tingginya angka-angka di atas lembaran ijazah, tetapi sejauh mana santri mempunyai prestasi kerja yang diakui oleh khalayak dan direstui oleh kiai. Belajar di pesantren tidak dibatasi oleh suatu waktu tertentu yang harus ditempuh.

12. *Restu kiai*, bahwa seorang santri jangan sampai berbuat sesuatu yang tidak disukai atau tidak direstui oleh kiai. Seorang santri harus berusaha selalu berada dalam satu pemikiran dengan kiai, tidak boleh berbeda prinsip kendati dengan alasan yang sangat rasional sekali pun. Kepemimpinan kiai dalam konteks ini tidaklah aneh jika bersifat kharismatik dan nyaris menjadi "setengah dewa"¹²

¹¹Sering menganjurkan orang lain untuk berbuat baik dan menghindari dosa-dosa, tetapi dirinya sendiri tidak mengamalkan anjuran itu, maka hal itu dinilai dosa besar tersendiri di hadapan Tuhan. Periksa al-Qur'an surah *al-Shaf* ayat 2-3.

¹²Secara sosiologis, kharisma seorang kiai lebih banyak dibentuk oleh budaya paternalistik sebagai warisan dari pola feodalisme zaman

Matra-Matra Plus dan Minus dalam Sistem Pendidikan Pesantren

Lembaga pendidikan pesantren berproses dan "menyejarah" sedemikian rupa, sehingga tidak terlalu banyak dipengaruhi oleh perkembangan kebudayaan dunia. Pesantren ternyata memiliki matra plus yang harus tetap dipertahankan dan dikembangkan, walaupun hingga kini belum pernah ada yang terbukti menciptakan terobosan peradaban yang spektakuler. Pesantren pun memiliki matra minus yang kurang baik atau tidak rasional untuk dipertahankan apalagi dikembangkan.

Matra-matra plus sistem pendidikan pesantren adalah sebagai berikut:¹³ *pertama*, pandangan pesantren bahwa manusia dilahirkan menurut fithrah masing-masing, yang di dalamnya terdapat daya-daya positif (*Ilâhiyyah*)

sebelum penjajahan Belanda di Indonesia. Kemudian untuk memperkuat tindakan kolonialnya, Belanda datang justru dengan taktik memperkuat pola feodalisme itu, sehingga para pemimpin lokal dengan lancar dan mudahnya memposisikan dirinya sebagai *patron* yang menguasai sepenuhnya terhadap klaim kebenaran. Dalam hal ini jika ada santri yang berani memutuskan hubungan se-aliran atau se-pemikiran dengan kiai, maka ia akan dipandang santri durhaka. Keabsolutan hubungan semacam itu hingga kini tetap amat kuat. Lihat tulisan Zamakhsyari Dhofier, "Tradisi Pesantren: Studi Tentang Peranan Kiai dalam Memelihara dan Mengembangkan Ideologi Islam Tradisional," *PRISMA*, No. 2/Tahun X/Februari 1981, hlm. 87.

¹³Mastuhu, *Dinamika Sistem*, hlm. 161. Terlebih lagi jika melihat budaya pondok pesantren dari dimensi jiwa kesederhanaan, sifat *shiddiq* yang diyakini, tampilan pengorbanan, dan format keikhlasannya, maka budaya semacam ini yang kini sangat diperlukan untuk meningkatkan mutu apa pun dari kebudayaan modern, termasuk masalah reformasi. Lihat Zamakhsyari Dhofier, "Kultur Pesantren dalam Perspektif Masyarakat Modern," dalam A. Rifa'i Hasan, *et al* (ed.), *Perspektif Islam dalam Pembangunan Bangsa* (Yogyakarta: PLP2M, 1987), hlm. 387-393.

yang harus dikembangkan sekaligus juga mencegah timbulnya daya-daya negatif (*syaythâniyyah*).

Kedua, pandangan bahwa tugas melaksanakan pendidikan merupakan ibadah pada Allah SWT, sehingga dalam menjalankan proses belajar-mengajar seyogyanya dilakukan secara ikhlas dan semata-mata hanya mengharap ridlâ (restu atau perkenan) dari Allah SWT.

Ketiga, hubungan yang baik dan saling menghormati antara murid dan guru, bahwa seorang murid tidak akan menjadi manusia yang baik dan pandai tanpa guru,¹⁴ sedangkan sang guru dalam melaksanakan tugasnya berprinsip sebagai hamba yang sedang mengemban amanat dari Allah SWT.

Keempat, pesantren adalah tempat mencari ilmu dan mengabdikan bukan sebagai tempat mencari ijazah, kalau pun dalam pengabdian itu kemudian diperoleh selebar ijazah, itu tak lebih sebagai kenang-kenangan yang logis yang bukan menjadi target atau tujuan utama.

Kelima, metode belajar model *halaqah*, *sorogan*, dan *bandongan* yang bermuatan kewajiban menghafal. Metode semacam ini akan semakin berkualitas apabila dikemas dalam bentuk dialog. Materi yang telah dihafal bisa dibahas secara dialogis melalui mekanisme diskusi.

Keenam, nilai-nilai pendidikan dengan sistem asrama, yaitu: (1)

¹⁴Agar ilmu yang diperoleh sang murid nanti berguna bagi diri dan orang lain, maka kepatuhan secara total kepada guru adalah format etika yang tidak bisa diabaikan di pondok pesantren, sebab hal ini telah menjadi persepsi budaya yang amat kuat. Soal ini, lihat tulisan A. Mukti Ali, *et. al.*, "Metodologi Pendidikan Agama," dalam Badri Yatim, *et. al.* (ed.), *K.H. Imam Zarkasyi di Mata Umat* (Gontor Ponorogo: Gontor Press, 1996), hlm. 905-964.

Pandangan bahwa dalam hal hak siapa pun sebaiknya mendahulukan hak orang lain sebelum hak dirinya sendiri. Sebaliknya, dalam hal kewajiban sebaiknya mendahulukan kewajiban diri sendiri sebelum kewajiban orang lain. (2) keteladanan dan selalu berlomba-lomba dalam membuat kebajikan yang sesuai dengan ajaran agama adalah sikap hidup yang mulia sekaligus kreatif, sehingga hidup ini tidak sia-sia,¹⁵ terutama dalam kerangka struktural budaya.

Ketujuh, pandangan hidup jangka panjang dan menyeluruh, bahwa bagi siapa pun yang benar-benar beriman pada Allah SWT akan selalu optimis dalam menjalani kehidupan yang terkadang amat misterius. Ia tak akan putus asa menerima musibah dan penderitaan, tetapi jika memperoleh keberuntungan tidak akan "lupa daratan" atau sombong. Setiap peristiwa dalam kehidupan dunia ini dipandang belum final dan semua peristiwa pada puncaknya akan kembali kepada kebenaran Tuhan, sekalipun pada saat itu ia tidak mengerti makna (*hikmah*) apa yang terkandung dalam peristiwa tersebut. Optimisme semacam ini yang memperkuat semangat para pengelola pesantren hingga kini.

Matra-matra minus yang tidak perlu dikembangkan adalah:¹⁶ *pertama*,

¹⁵Keteladanan dan pribadi kreatif dalam mengembangkan potensi masyarakat tercontohkan pada pribadi K.H. Abd. Basith Abdullah Sajjad, B.A. (salah satu kiai Pondok Pesantren Annuqayah, Guluk-Guluk, Sumenep, Madura) yang sukses memboyong piala *Kalpataru* Presiden RI pada 1981.

¹⁶Mastuhu, *Dinamika Sistem*, hlm. 162. Karena wawasan kritisisme berpikir dibendung di pondok pesantren, akibatnya lembaga ini dipandang sebagai lembaga yang tertutup dan selalu menolak segala sesuatu yang datang dari luar, walaupun yang ditolak adalah pikiran-

pandangan bahwa ilmu adalah hal yang sudah mapan dan dapat diperoleh melalui barokah kiai. Pandangan ini mengabaikan potensi kecerdasan dan kegunaan pelatihan berpikir setiap murid atau santri.

Kedua, pandangan yang tidak kritis yang menyatakan bahwa setiap yang diajarkan oleh kiai, ustadz dan kitab kuning diterima sebagai kebenaran final yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Pandangan ini mengakibatkan menguatnya wawasan *absolutisme* yang tanpa malu-malu selalu memonopoli kebenaran tertentu.

Ketiga, pandangan bahwa kehidupan *ukhrâwi* (akhirat) paling penting, sedangkan kehidupan *duniawi* (dunia pra-akhirat) dipandang tidak (kurang) penting. Pola pandang ini mengabaikan urgensi membangun peradaban umat Islam yang bermutu untuk generasi mendatang. Peradaban tidak mungkin dibangun serius apabila bersikap *negative thinking* pada kehidupan duniawi.

Keempat, metode belajar dengan menghafal dan teori-teori pemikiran tradisional yang diterapkan untuk semua ilmu pengetahuan apa pun yang diajarkan di dalamnya. Para santri dipandang pintar apabila telah mampu menghafalkan sekian ilmu, misalnya *nazham-nazham* ilmu *nahw-sharraf*, bukan mereka yang mampu membuat dan memahami artikel dalam bentuk Bahasa Arab. Kemasan ilmu-ilmu keislaman dalam bentuk *nazham-nazham* semacam itu sebetulnya merupakan ciri khas dalam

hampir setiap kitab kuning, sehingga tradisi keilmuan pendidikan pesantren sangat sering bersentuhan dengan format-format kesusastraan Islam.¹⁷

Kelima, kepatuhan mutlak kepada kiai, guru dan kehidupan kolektif (asrama) yang tidak diimbangi dengan kebebasan mengembangkan potensi jati diri (individualitas). Suasana tersebut mengakibatkan terhambatnya kemampuan berpikir kritis.¹⁸

Keenam, pandangan hidup *fatalistis* yang bersikap menyerahkan nasib diri

¹⁷Al-Ghazâlî sendiri ketika membahas *ma'rifah Allah* mengutip puisi berikut tanpa menyebut nama penyairnya: “Engkau telah tampak, maka Engkau tidaklah tersembunyi, kecuali bagi tuna netra yang tidak tahu sang rembulan. Tetapi Engkau juga tersembunyi di balik apa yang Engkau tampilkan. Maka bagaimana mungkin seseorang yang tertutup bagi makrifat bisa mengenali-Mu?” Lihat Abû Hâmîd Al-Ghazâlî, *Ihyâ ‘Ulûm al-Dîn*, Juz 14 (Kairo: Dâr al-Sya’b, t.t.), hlm. 2618. Catatan kaki ini dikutip dari artikel Jamal D. Rahman, “Distorsi Khazanah Kultural Pesantren: Aspek Esoteris dan Estetis,” dalam A.Naufal Ramzy (ed.), *Islam dan Transformasi Sosial Budaya*, Cetakan Ke-1 (Jakarta: Deviri Ganan, 1993), hlm. 131.

¹⁸Potensi berpikir manusia adalah anugerah dari Allah SWT. Maka seniscayanya para santri dikondisikan untuk memupuk dan mengembangkan potensi berpikir itu. Sebab, para santri adalah juga manusia yang mampu mempelajari dirinya sendiri sebagai suatu organisme yang dinamis. Betapa pentingnya memandang manusia sebagai makhluk yang berpikir, dapat dibaca dalam komentar Harold H. Titus: “*Man is an animal organism, it is true but he is able to study himself as an organism and to compare and interpret living forms and to inquire about the meaning of human existence. To do so he must be able in some sense to stand outside of, or to transcend, the life and conditions which he judges and compares. Man lives at the point where nature and spirit somehow meet.*” Lihat Harold H. Titus, *Living Issues in Philosophy: Introductory Text Book* (New York: t.p., 1959), hlm. 26. Komentar Harold H. Titus ini dikutip dari buku Endang Saifuddin Anshari, *Ilmu, Filsafat dan Agama*, Cetakan ke-8 (Surabaya: Bina Ilmu, 1990), hlm. 8.

pikiran yang bertipe “*Abduhisme*” (Pemikiran Muhammad Abduh, Mesir, penganjur pembaharuan pemikiran Islam). Lihat tulisan Armin Nasution, “Santri: Orang Kota-Pedesaan,” *Majalah Pesantren*, No. 1 Vol.VII (1989), hlm. 91-92.

kepada keadaan apa adanya. Hal itu juga ditopang dengan perilaku sakral dalam menghadapi berbagai realitas kehidupan keduniawian sehari-hari¹⁹ Pandangan hidup semacam itu tampak begitu kuat dipengaruhi oleh wawasan teologis yang bercorak *Asy'ariyah*, yaitu konsepsi teologi yang memandang manusia bukan sebagai kreator dalam memperbaiki mutu nasib kehidupannya.²⁰

Pola Baru Manajemen Pendidikan Masa Depan pada Era Otonomi Daerah.

Pendidikan dan kebudayaan dialihkan menjadi kewenangan daerah sehingga otoritas operasional merupakan tugas pemerintah daerah sejak diberlakukan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah khususnya pasal 11.²¹ Undang-undang tersebut kemudian melahirkan suatu konsep atau pola baru manajemen pendidikan yang relevan dengan pola otonomi daerah.

Perbandingan berbagai dimensi antara pola lama dan baru dalam konsep pendidikan adalah sebagai berikut:²²

NO	POLA LAMA	POLA BARU
1	Koordinasi secara subordinasi	Koordinasi secara otonomi
2	Pengambilan keputusan secara sentralistik	Pengambilan keputusan partisipatif
3	Ruang gerak kebijakan kaku	Ruang gerak kebijakan lentur
4	Pendekatan Birokratik	Pendekatan Profesional
5	Format kebijakan sentralistik	Format kebijakan desentralistik
6	Diatur oleh Pemerintah Pusat	Diatur oleh Motivasi diri
7	Over-regulasi	De-regulasi
8	Pusat mengontrol	Pusat menyarankan
9	Pusat mengarahkan	Pusat memfasilitasi
10	Menghindari risiko	Mengelola risiko
11	Menggunakan uang sampai habis	Menggunakan uang secara efisien
12	Manajemen individual yang cerdas	Manajemen <i>teamwork</i> yang cerdas
13	Informasi ter-pribadi (dimonopoli pribadi)	Informasi terbagi (menyebarkan ke semua <i>stakeholder</i>)
14	Pendelegasian staf dalam koridor loyalitas kaku	Pemberdayaan staf untuk kreatif dalam loyalitas yang lentur.
15	Organisasi bersifat hirarkis dan Instruksional	Organisasi bersifat datar, familiar, dan kolektif
16	Staf identik dengan "Robot"	Staf sebagai mitra kerja dalam <i>teamwork</i>

¹⁹Bahwa manusia seharusnya tidak fatalistis, tetapi mestinya kreatif dan produktif, lihat Jalaluddin Rahman, *Konsep Perbuatan Manusia Menurut Qur'an: Suatu Kajian Tafsir Tematik*, Cetakan ke-2 (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm 167.

²⁰Kuatnya pengaruh teologi *Asy'ariyah* di pesantren, lihat tulisan Masdar F. Mas'udi, "NU & Teologi al-Asy'ari: Kajian Melalui al-Ibānah 'an Ushūl al-Diyānah" *Majalah Pesantren*, No. 4 Vol. III (1986), hlm. 86– 99. Otoritas Masdar F. Mas'udi dalam hal ini cukup kuat karena ia alumni Pesantren Krapyak Yogya.

²¹Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Cetakan ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).

²²Slamet, et al, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah* (Jakarta: Direktorat Pendidikan Menengah Umum Departemen Diknas, 2000), hlm. 7-8.

Pola baru konsep manajemen pendidikan berbasis sekolah atau SBM (*School Based Management*) tersebut secara konseptual-operasional menggunakan pendekatan sistem *input – process – output*. Penjelasan yang ringkas sebagai berikut:

Sistem *input* bermuatan prinsip-prinsip yang saling berkorelasi, yaitu: (1) Memiliki kebijakan mutu; (2) Merumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran; (3) Tersedianya SDM (Sumber Daya Manusia) dan SDA (Sumber Daya Alam) yang siap dilatih serta diberdayakan secara optimal; (4) Memiliki harapan prestasi mutu yang tinggi; (5) Memfokuskan pelayanan terbaik pada peserta didik sebelum pada yang lain; (6) *Input* manajemen berbentuk tugas yang jelas dengan rencana rinci dan sistematis. Program pendukung dan ketentuan lainnya yang disepakati dapat dipatuhi oleh seluruh *stakeholder* (para pengurus, guru, murid, dan wali murid, serta lainnya yang berwenang).

Sistem *process* bermuatan prinsip-prinsip yang saling korelatif, yaitu: (1) Efektivitas proses belajar-mengajar yang tinggi; (2) Kepemimpinan sekolah yang kuat; (3) Tenaga pendidik dikelola secara efektif; (4) Sekolah memiliki budaya mutu standar; (5) Memiliki *teamwork* yang kompak, cerdas, dan dinamis (saling berdinamika); (6) Memiliki kewenangan atau kemandirian; (7) Partisipasi warga sekolah dan masyarakat; (8) Keterbukaan manajemen secara transparan; (9) Sikap psikologis, bahwa sekolah mempunyai kemauan (*animo*) yang kuat untuk berubah ke arah yang lebih baik; (10) Tradisi evaluasi dan perbaikan secara periodik berkelanjutan (berkesinambungan); (11) Sekolah responsif dan antisipatif terhadap setiap kebutuhannya. (12) Sekolah memiliki akuntabilitas atau pertanggungjawaban yang jujur; (13)

Sekolah memiliki sustainabilitas, yaitu proses akumulasi peningkatan mutu SDM, diversifikasi sumber dana, aset yang bisa menggerakkan *income generating activities*, dan dukungan yang tinggi dari masyarakat terhadap aktivitas dan eksistensi lembaga sekolah (pendidikan) yang bersangkutan.

Sistem *output* mengandung prinsip-prinsip tentang kinerja sekolah yang diukur dari: kualitas, efektivitas, produktivitas, efisiensi, inovasi, kualitas kehidupan kerja, moral kerja, dan profil para alumninya. Grafik tentang *output* pencapaian akademik yang berkaitan dengan nilai prestasi belajar, dan *output* non-akademik yang berkaitan dengan prestasi kegiatan ekstra-kurikuler.

Strategi Pendidikan Pesantren pada Era Otonomi Daerah

Strategi pendidikan apa pun bentuknya, baik dalam *frame* pendidikan umum atau pendidikan pesantren merupakan sebuah idealisme. Suatu cita-cita luhur (idealisme) sangatlah sulit dicapai apabila tidak dikelola dengan strategi tertentu. Lembaga pendidikan pesantren tentu memerlukan suatu strategi yang bermutu, supaya cermat memahami kebutuhan kelembagaan secara kekinian, dan mampu pula mengantisipasi kebutuhan lain yang strategis di masa depan. Lembaga pendidikan pesantren apabila mengabaikan hal tersebut, maka dimungkinkan akan terjadi kemandegan (stagnasi) tertentu, atau berada dalam kondisi "*lâ yamûtu wa lâ yahya*" (tidak hidup, tapi juga tidak mati).

Salah satu strategi yang bagus adalah menggunakan metode *SWOT* (*Strength – Weakness – Opportunities –*

Threat)²³ sebagai upaya menghasilkan temuan yang realistis untuk ditindaklanjuti, di samping menerapkan metode *SWOT* dalam mengevaluasi kinerja lembaga pendidikan pesantren juga sangat dibutuhkan kejujuran para pengelola dan *stakeholder*.

Dimensi kejujuran adalah sesuatu yang sangat mahal, sebab walaupun lembaga pendidikan pesantren dikenal sebagai lembaga berbasis ajaran Islam, belum tentu mental kejujuran dapat tumbuh berkembang secara baik dan merata. Metode *SWOT* bisa menjadi teropong dalam membedah secara transparan keberadaan lembaga apa adanya.

Segi Strength (Aspek Kekuatan/Kelebihan)

Tujuh aspek nilai-nilai universal dalam kategori *matra plus* di lembaga pendidikan pesantren tidak dapat berkembang dan berdinamika secara baik dan berkesinambungan apabila tidak diapresiasi dalam kerangka strategis. Hal itu harus dinilai atau dipandang sebagai suatu kekuatan atau kelebihan yang perlu dipertahankan secara terencana dan sistematis, dan kalau perlu "dipromosikan". Produk perusahaan tertentu misalnya dapat dikenal oleh khalayak karena publikasi atau promosi yang gencar, baik melalui media *advertising* cetak maupun elektronik. Lembaga pendidikan pesantren pun semestinya dapat melakukan hal yang sama, mengapa tidak?

Matra plus yang berbentuk tujuh nilai universal itu sebetulnya telah mampu mencetak sejumlah lulusan atau

alumni dan diduga prosentase terbesarnya adalah telah mampu mencapai prestasi tertentu.

Sejumlah alumni tersebut alangkah bagusnya jika dicatat secara rapi dan lengkap dengan *curriculum vitae* mereka. Catatan rapi itu dapat digunakan sebagai data untuk mengetahui grafik turun naiknya kualitas alumni. Angka-angka tersebut kelak menjadi aspek penting dalam "mempromosikan" kelebihan lembaga. Data alumni tersebut merupakan salah satu produk yang dihasilkan dari penggunaan metode *Strength*.

Aspek kekuatan atau kelebihan lembaga sesungguhnya bukan murni sebagai produk kreativitas para pengelola dan *stakeholder*, tetapi justru merupakan karunia dan nikmat besar yang diberikan oleh Allah SWT, maka ada baiknya melakukan dan mengaplikasikan sikap *tahadduts bi al-ni'mah* seperti yang dilakukan Abû Bakr al-Shiddîq RA.²⁴

Penggalan kisah Abû Bakr al-Shiddîq RA yang berkaitan dengan *tahadduts bi al-ni'mah* (sikap mengekspresikan nikmat Allah) sungguh dapat diteladani khususnya oleh lembaga pendidikan pesantren, agar supaya pengaplikasian ajaran-ajaran moral di dalam al-Qur'an dapat dibuktikan sendiri dan bisa menjadi teladan bagi kaum muslim. Setiap mengalami kebahagiaan atau mengecap kenikmatan tertentu wajiblah bersyukur kepada Allah SWT. Ajaran moral semacam itu dijelaskan dalam al-Qur'an:

²³Made Pidarta, *Perencanaan Pendidikan Partisipatori Dengan Pendekatan Sistem* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 80 – 81.

²⁴Mensyukuri nikmat Allah SWT sungguh merupakan kewajiban moral seorang Mukmin. Lihat Abu Ahmad Muhammad Naufal, *Do'a-do'a Mustajab dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits* (Yogyakarta: LekPIM, 2002), hlm. 91-95.

“Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap bersyukur nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada ayah dan ibuku, dan untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau ridhai, serta berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak-cucu-ku. Sungguh aku bertaubat kepada-Mu dan sungguh aku termasuk golongan orang-orang yang berserah diri.” (QS. Al-Ahqâf [46]: 15)

Sebagian ahli tafsir berpendapat, bahwa turunnya ayat di atas berkenaan dengan ungkapan rasa syukur Abû Bakr al-Shiddîq RA ketika kedua orang tuanya menyatakan masuk Islam. Aplikasi rasa syukur tersebut diwujudkan dalam bentuk memerdekakan sembilan budak muslim yang selalu disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Salah satu di antaranya ialah Bilâl ibn Rabah dan ‘Amir ibn Fuhayrah.

Kisah di atas dapat diteladani oleh lembaga pendidikan pesantren (yang telah memiliki kekuatan atau kelebihan) dalam bentuk tidak hanya setiap periodik selalu merayakan *milad* (sejarah lahirnya lembaga itu) secara meriah, namun juga dikemas dalam format penyantunan kepada masyarakat yang *dla’if* yang memang benar-benar membutuhkan bantuan. Wujud bantuan bisa sangat variatif, misalnya berupa beasiswa kepada putera-puteri masyarakat sekitar pesantren atau upaya mengeluarkan mereka dari derita kemiskinan, baik kemiskinan personal maupun kemiskinan struktural.²⁵

²⁵Muatan program kepengajaran dan kependidikan yang terlalu besar prosentasenya seringkali kurang memperhatikan problem kemiskinan struktural yang secara sistematis mendera kehidupan masyarakat. Kasus harga tembakau masyarakat Madura yang setiap tahun dipertandingkan oleh sekian cukong sehingga tak pernah ada harga tembakau yang

Segi Weakness (Aspek Kelemahan)

Lembaga pesantren di samping memiliki tujuh macam aspek kekuatan atau kelebihan, juga memiliki enam aspek kelemahan dalam kategori *matra-matra minus*. Persoalannya adalah bagaimana metode yang terbaik untuk mengevaluasi keenam aspek itu. Sebab, jika salah memilih cara tidak tertutup kemungkinan ada pihak pengelola yang tersinggung, sehingga justru akan membuat problematika baru yang seharusnya tidak terjadi.

Salah satu cara atau mekanisme mengevaluasi enam aspek kelemahan itu ialah melalui *musyawarah lengkap (quorum)* segenap kiai, para pengurus, pengelola, dan *stakeholder* yang mengacu kepada AD/ART lembaga pendidikan pesantren itu. Sebagian besar *stakeholder* seringkali tidak mengenal atau tidak mendapatkan

menggembirakan mereka adalah juga karena kurangnya atau tidak adanya “pembelaan politik ekonomi” dari para kiai atau pengelola lembaga-lembaga pesantren besar atau pesantren kecil di Pulau Garam itu. Tak pernah terekspos adanya koordinasi intensif yang dilakukan oleh para kiai untuk membangun kekuatan tawar (*bargaining*) dalam berhadapan dengan para cukong tembakau. Padahal kalau di Madura dibentuk sebuah paguyuban besar petani tembakau yang dipimpin oleh seorang pemimpin kharismatik (biasanya dari kalangan kiai) mungkin dapat diduga bahwa para cukong tembakau itu tidak berani sembarangan menentukan harga tembakau secara sepihak. Para cukong itu akan memperhitungkan kekuatan politik ekonomi masyarakat Madura justru di antaranya karena solidaritas mereka dikomandani oleh seorang kiai kharismatik. Kita sangat prihatin pada mereka, sebab harga tembakau mereka pada tahun 2003 ini sampai ada yang dihargai Rp 2.000 per-kg. Oleh karena itu, jika muncul kiai kharismatik yang mau secara aplikatif memperhatikan problema ini, dan mengorganisirnya secara kolektif pula, saya memandang upayanya itu sebagai salah satu bentuk kesyukurannya kepada Allah SWT atas nikmat yang diberikan.

informasi lengkap tentang detail-detail AD/ART lembaga, sehingga aturan main pengelolaan lembaga juga tidak berperan sebagai rambu-rambu normatif yang dipatuhi oleh semua pihak.

Otoritas tertinggi dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam musyawarah bukan orang-perorang, tetapi suara aklamasi para *stakeholder*. Orang-perorang tidak dibenarkan bersikap terlalu percaya diri (*over-confidence*) dengan mengabaikan hak berpendapat (berpikir) masing-masing individu sebagai *stakeholder*. Jajaran *top-leader* dalam lembaga pendidikan harus rendah hati dan lapang dada menerima masukan ide atau kritikan yang bersifat konstruktif.

Jajaran elite lembaga perlu memanggil sang pengkritik dalam suatu pertemuan terbatas untuk berdiskusi mencari solusi jika muncul kritik yang pedas tetapi faktual (riil), bukan kemudian dimarahi secara emosional. Forum pertemuan terbatas itulah yang diharapkan menjadi wahana berargumentasi secara ilmiah-rasional guna menemukan pemecahan masalah secara obyektif dan aklamatif.

Para elite lembaga pesantren dalam merespons peran alumni dengan *performance* yang beragam terkadang tidak rasional menyikapi alumnus yang *membeling* atau kontroversial ketika melontarkan kritik atau pemikiran. Pemikiran alumnus *membeling* atau kontroversial yang dilontarkan berbeda dengan format ideologi para elite lembaga tidak jarang yang bersangkutan diberi *stigma* negatif. *Stigma* negatif seringkali berubah menjadi konflik psikologis antara alumni dengan elite-elite lembaga pendidikan pesantren apabila tidak ada upaya melakukan

*tabayyun*²⁶ (konfirmasi ilmiah) dengan sang alumnus yang *membeling* itu untuk menanyakan atau mendiskusikan pokok persoalan yang dilontarkan. Alumni pada akhirnya akan terkotak-kotak ke dalam faksi-faksi, yaitu faksi yang pro-elite lembaga dan faksi yang kontra-elite lembaga.

Problematika psikologis yang dibiarkan begitu saja dan tidak disadari merupakan faktor kelemahan dan ketidakcerdasan memahami aspek filsafati *tabayyun*. Jawaban yang dikemukakan oleh K. H. Moh. Idris Djauhari tatkala ditanyakan tentang pemikiran kontroversial alumnus lembaganya (PP Al-Amien, Preduan, Sumenep, Madura) yang bernama Zuhairi Misrawi (anak muda kelahiran desa Kapedi, Bluto, Sumenep, yang kini sedang *berasyik-masyuk* dengan kelompok Jaringan Islam Liberal, mengatakan bahwa Si Zuhairi ini sedang dalam "*proses mencari*" dan wajar bagi siapa pun yang memfungsikan kegelisahan intelektualnya secara serius, tidak perlu dan tidak boleh dimarahi karena hanya berpikiran *membeling*.²⁷

K. H. Moh. Idris Djauhari juga telah bertanya langsung kepada Zuhairi perihal masalah itu. Pengasuh PP Al-Amien telah menunaikan kewajiban

²⁶Melakukan *tabayyun* (konfirmasi ilmiah) adalah anjuran moral dari QS. Al-Hujurat [49]: 6. Rujukan moral ini harus diperhatikan dan dilaksanakan agar supaya informasi negatif yang sepihak dari seseorang tentang pemikiran *membeling* alumni tidak ditelan bulat-bulat sebagai kebenaran final, sehingga berupaya melakukan konfirmasi ilmiah merupakan kewajiban moral yang harus dilakukan oleh elit-elite lembaga itu atau para *stakeholder*-nya.

²⁷Dalam hal ini, penulis berbincang dengan K. H. Moh. Idris Jauhari tatkala penulis bersilatullah hari raya Fithri ke rumah beliau pada hari Kamis, 03 Syawal 1424 / 27 November 2003, disaksikan oleh alumni lainnya seperti Jamal D. Rahman dan Saiful Huda.

moral kepada alumninya, yaitu ber-*tabayyun* secara ilmiah, kendati pun tidak dapat diinterpretasi sebagai sikap setuju terhadap pemikiran kontroversialnya itu. Stigma negatif yang disematkan pada seorang alumnus karena berpikiran *membeling* tidak bisa dibenarkan.

Segi Opportunities (Peluang/ Kesempatan)

Lembaga pendidikan pesantren dengan menggunakan metode yang ketiga ini dapat mencatat sekian peluang atau kesempatan penting yang perlu digarap dan diwujudkan secara terencana, yaitu: *Pertama*, kewibawaan kiai sebagai figur pemimpin umat yang bertipe jujur dan ikhlas dapat dijadikan modal publikatif untuk meyakinkan semua pihak untuk menyekolahkan anaknya ke lembaga pendidikan pesantren.

Kedua, perilaku tidak bermoral yang sering terjadi di sekolah-sekolah umum di luar lembaga pendidikan pesantren merupakan momentum yang baik bagi lembaga ini untuk menawarkan konsepsi dan sistem pendidikan yang siap mencetak anak didik yang bermoral, religius, berpengetahuan luas, serta bermental percaya diri (*confidence*) dalam menjalani kehidupan yang majemuk dan kompetitif, sehingga mereka bisa terhindar dari tragedi menjadi seorang pengangguran.

Ketiga, temuan-temuan sains-teknologi yang semakin canggih dan beraneka macam kegunaannya bagi pola kehidupan modern, lembaga pendidikan pesantren harus bisa memanfaatkan sebagai wahana atau instrumen meningkatkan mutu dan kreativitas santri, guru, serta seluruh SDM-nya.

Keempat, pemberdayaan kualitas SDM juga memerlukan kerjasama

(*networking*) dengan lembaga lain yang *bonafide*, baik berbentuk beasiswa bagi santri berprestasi untuk berstudi S1, S2, atau S3 di luar negeri atau di dalam negeri, maupun berbentuk pelatihan-pelatihan penting yang insidental dan tidak periodik.²⁸

Segi Threat (Hambatan/Ancaman)

Beberapa sektor di luar lembaga pendidikan pesantren termasuk kategori sebagai hambatan, ancaman, atau tantangan yang memerlukan respons elegan, supaya secara kelembagaan tidak menimbulkan efek samping dalam upaya meningkatkan mutu lembaga itu sendiri. Beberapa sektor yang dimaksud, yaitu: *Pertama*, sektor sosial. Masyarakat yang terdidik prosentasenya diduga semakin besar karena semakin banyak yang tamat S1, tampaknya mulai cenderung mengubah model masyarakat *paguyuban* sebagai tradisi menuju model masyarakat *patembayan*²⁹ Struktur sosial umat dalam masyarakat *paguyuban* lebih membutuhkan model kepemimpinan kharismatik, bahkan yang paternalistik. Sebagian masyarakat *paguyuban* dalam memutuskan pilihan-pilihan hidupnya memang sangat tergantung kepada restu atau kebijakan pemimpin yang kharismatik (biasanya dari kalangan kiai atau ulama). Pemberian nama bayi yang baru

²⁸*Networking* itu seperti kerja sama PP Al-Amien, Preduan, Sumenep, Madura, dengan Universitas Al-Azhar Mesir, Universitas Ummul Qura Mekah, International Islamic University, Islamabad Pakistan, dan lainnya. Lihat K. H. Moh. Idris Djauhari, *Pola Umum Pendidikan Sistem Mu'allimin* (Preduan: PP Al-Amien, 2000), hlm. 1-37.

²⁹Model masyarakat *patembayan* yang dipandang lebih korelatif dengan upaya merintis "cetak biru" masyarakat madani (*civil society*). Lihat Nurcholish Madjid, *Memberdayakan Masyarakat Menuju Negeri yang Adil, Terbuka, dan Demokratis* (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. 1 – 20.

dilahirkan, sang ayah bayi misalnya masih perlu datang menemui kiai meminta nama untuk anaknya. Sang ayah belum merasa memiliki otoritas bebas untuk memberi nama bagi anaknya.

Hal itu berbeda dengan masyarakat *patembayan*, karena sikap kemandirian (*independensi*) semakin menguat yang ditopang dengan keluasan wawasan berpikir sebagai buah nyata dari penguasaan ilmu pengetahuan secara lebih mendalam. Wawasan berpikir yang tumbuh subur di tengah masyarakat bukan hanya karena telah pernah bersentuhan dengan pendidikan akademik (S1, S2, S3), tetapi juga karena semakin melubernya media informasi, seperti koran, majalah, berita dan *talkshow* di televisi, serta beragam berita dan ilmu pengetahuan yang mudah diakses lewat *cyber internet*, ke khalayak dan rumah-rumah mereka.

Efek positif dari pertumbuhan subur wawasan berpikir itu berbentuk kreativitas pribadi yang kian menguat dalam pengambilan keputusan apa pun dalam kehidupan mereka. Jangankan masalah yang berkaitan dengan soal-soal praktis kehidupan yang kian kompetitif, untuk masalah yang bertema ajaran agama Islam pun mereka mulai mampu mengambil keputusan sendiri tanpa perlu berkonsultasi dengan seorang kiai. Masyarakat *patembayan* telah mengenal dalil-dalil yang *qath'î* (pasti dan tidak boleh diberi interpretasi baru) dan dalil yang *zhannî* (tidak pasti dan boleh diberi interpretasi baru) yang tercantum di dalam al-Qur'an dan Hadis.³⁰

³⁰Misalnya untuk memahami teori epistemologi hukum Islam minimal menguasai kitab karangan Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushûl al-Fiqh* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1977), 236 halaman, dan karangan Imam Al-Ghazâlî, *Al-Mustashfâ fî 'Ilm*

Produk dari pengenalan atau penguasaan terhadap dalil-dalil al-Qur'an dan Hadis itu ialah tumbuhnya sikap saling bertoleransi untuk berbeda pendapat dalam masalah *furû'iyah* keagamaan, sekaligus menghindari sikap mengklaim suatu kebenaran tertentu. Shalat tarawih 11 rakaat atau 23 rakaat kini tidak lagi menjadi pemicu konflik sosial. Fokus perhatian sekarang bukan jumlah rakaat shalat tarawih, tetapi bagaimana caranya orang yang tidak pernah shalat tarawih berubah menjadi sering shalat tarawih beserta pilihan pribadinya tentang jumlah rakaat yang diyakininya.

Kepemimpinan umat yang diperlukan dalam masyarakat *patembayan* adalah pemimpin yang bertipe demokratis. Pemimpin yang tidak mempertahankan kekuasaan dengan segala cara pengaruh, tetapi yang mengedepankan kejujuran hati nurani, akuntabilitas publik, memiliki animo kuat menegakkan kebenaran dan keadilan sosial, dan sikap menghormati kebebasan berpikir umat sebagai HAM (Hak Asasi Manusia) yang sangat mendasar.

Tipe demokratis yang dimaksudkan di atas adalah pemimpin yang memberi peluang kepada umat untuk memberdayakan diri secara optimal, khususnya di sektor kebebasan berpendapat, berpikir, memilih dan dipilih. Demokrasi secara ideal meniscayakan kekuatan yang seimbang antara supra-struktur dan infra-struktur masyarakat. Supra-struktur yang kuat akan menciptakan sistem yang mengarah pada kepemimpinan tipe otoriter, sedangkan jika yang lebih kuat infra-

al-Ushûl (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993), 392 halaman.

struktur, maka sistem yang akan terbentuk adalah tipe tiran (monokrasi).

Kepemimpinan bertipe kharismatik walaupun di antara masyarakat *patembayan* masih ada yang menginginkan bukanlah yang menonjolkan aspek keningratan (kedarahbiruan), namun tipe kharismatik yang dikemas secara rasional dan bersahaja. Sang pemimpin kharismatik-rasional misalnya ketika dihadapkan pada dua orang yang sedang berkonflik, yaitu X dan Y. Pihak Y bukan kawan akrab, sementara pihak X adalah kawan akrab sekaligus famili dekat tetapi justru berbuat aniaya kepada si Y. Sang pemimpin tersebut tidaklah rasional jika tidak berdakwah kepada X supaya X sadar dan mengembalikan hak-hak tertentu yang dirampasnya dari si Y, bukan sekadar harus meminta maaf kepada Y.

Pemimpin kharismatik yang emosional dan tidak rasional apabila ternyata sang pemimpin tidak berani (karena takut kehilangan kesetiannya) atau kasihan untuk berdakwah secara *nahy munkar* kepada si X. Sang pemimpin ketika tidak berani mengambil risiko mengecewakan satu orang kawan akrab yang seharusnya disadarkan agar bisa segera kembali ke jalan yang lurus, maka pemimpin semacam ini tidak dapat memenuhi kualifikasi sebagai ulama yang *waratsat al-anbiyâ'*. Masyarakat *patembayan* sangat peka memahami penampilan kepemimpinan di sekitarnya, karena itulah menjadi seorang pemimpin di tengah-tengah mereka jauh lebih sulit daripada di tengah masyarakat *paguyuban*.

Kedua, sektor kebudayaan. Lembaga pendidikan pesantren harus cermat dan responsif terhadap berbagai perubahan budaya yang sedang terjadi secara makro-internasional. Globalisasi

peradaban dunia bagaikan pisau bermata dua yang perlu diperhatikan secara seksama, agar efek negatif dalam bentuk dekadensi moral dapat dibendung dan tidak leluasa memasuki kawasan lembaga dan masyarakat di sekitarnya. Sikap responsif tersebut akan lebih baik lagi kalau diformat dengan langkah inovatif bukan sekadar bersikap reaksioner semata.

Model berbusana baru yang populer dengan sebutan "jilbab gaul" misalnya, harus diusahakan tidak menyebarkan virus pengaruhnya ke dalam lingkungan lembaga itu. Model "jilbab gaul" saat ini sangat kebablasan dalam hal memamerkan keindahan dada perempuan lewat penggunaan baju ketat, walaupun di bagian kepala terpakai kerudung seleher. Kerudung seleher lebih bermotifkan estetika gaya bukan hakikat norma. "Jilbab gaul" adalah produk busana yang sangat dipengaruhi model busana hedonistik dari Barat. Kriteria Barat tentang busana lebih difokuskan kepada munculnya keterpesonaan kepada tampilan-tampilan yang sensual dan erotis, sebab dengan cara itulah omzet penjualan produk mereka akan semakin besar. Semua itu mengarah pada satu pikiran yang sama, yaitu kapitalistik.

Buah positif globalisasi peradaban dunia terasa ketika semakin mudah mengakses temuan baru sains dan teknologi, sementara bagi lembaga pesantren bisa bermanfaat jika benar-benar tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Kritik ideologi terhadap muatan nilai-nilai dari temuan-temuan baru semacam itu amatlah penting dimiliki.³¹

³¹Tentang urgensi kritik ideologi, lihat Frans Magnis-Suseno, *Filsafat sebagai Ilmu Kritis* (Yogyakarta: Kanisius, 2002), hlm. 227 – 242.

Ketiga, sektor politik. Pendidikan pesantren secara institusional lebih baik bilamana tidak menjadi partisan partai politik, sebab jika para kiai dan pengelola berdiri di atas semua golongan dan semua aliran partai politik (bersikap netral atau non-partisan), maka akan lebih optimal dan didengar oleh semua pihak tatkala berdakwah kepada masyarakat.

Godaan yang paling dahsyat bagi para kiai bukanlah beristri lebih dari satu (poligami), tetapi terbujuk untuk ikut terlibat sebagai pengurus (aktivis) partai politik. Kesibukan serius dalam partai politik berakibat, sedikit atau banyak, menelantarkan tugas-tugas rutin kepesantrenan dan para santri yang menjadi tanggung jawab lembaga. Ilmu politik secara teoritis –yang sebetulnya bermuatan idealisme luhur—ketika diterapkan dalam kerangka politik praktis, yang dikedepankan bukanlah kebenaran suara hati nurani, namun konteks kepentingan pribadi atau kepentingan partai.

Performance kinerja aktivis partai politik yang bertugas di lembaga DPRD hingga DPR RI dari hasil Pemilu 1999 yang lalu ternyata lebih memperlihatkan wajah tidak tahu malu dalam berkubang dengan praktek kolusi dan korupsi³². Negara seakan milik diri sendiri yang bebas mau diapakan saja, sehingga yang menggelisahkan pikiran bukan aspirasi rakyat yang mati-matian wajib diperjuangkan, tetapi malah lebih sibuk bermanuver politis untuk merengkuh duit sebanyak-banyaknya walau dengan cara culas yang vulgar sekali pun. Masalah kinerja aktivis politik lembaga

³²Perilaku jelek anggota DPR RI disinggung oleh Denny J.A., "Pemecatan Massal Anggota DPR", *Republika*, Kamis, 17 Juli 2003, hlm. 5.

legislatif negara yang semacam itu yang dikritisi dengan tegas oleh M. Arief Hakim³³ dengan pernyataannya:

"Jika di masa Orde Baru, korupsi lebih banyak dilakukan lingkaran eksekutif dan kroni-kroninya, maka di era kini (yang katanya "era reformasi") korupsi telah menyebar dan merata di lembaga legislatif (juga yudikatif), dari pusat sampai daerah."

Pertanyaan menarik yang perlu diangkat di sini adalah mungkinkah kiai yang menjadi anggota DPR/DPRRI berani bersuara lantang berdasarkan suara kebenaran hati nuraninya yang pasti selalu jujur demi sebuah idealisme luhur memperjuangkan kepentingan rakyat atau bangsa ini? Seluruh kiai di Indonesia yang menjadi anggota DPRD/DPR RI kalau memang betul adalah benar-benar berani memihak pada suara kebenaran hati nurani dengan tulus memperjuangkan esensi kepentingan rakyat, khususnya di sektor ekonomi, besar kemungkinan artikel yang ditulis oleh M. Arief Hakim di atas tidak muncul di media surat kabar. Kiai politisi yang berani semacam itu sudah pasti terekspose secara luas di tengah belantara berita terkini di Indonesia.

Adhie M. Massardi (mantan sekretaris pribadi K. H. Abdurrahman Wahid) dalam artikelnya bahkan menulis³⁴:

"Saya pernah bertanya kepada teman saya anggota DPR dari partai

³³Lihat M. Arief Hakim, "Korupsi Sebagai Gaya Hidup", *Republika*, Rabu, 10 September 2003, hlm. 5.

³⁴Lihat Adhie M. Massardi, "Setan Melingkar di Gedung Senayan", dalam *Koran Tempo*, Senin, 30 Juni 2003, hlm. 5. Artikel ini bisa diakses pula melalui website: www.gusdur.net.

yang pernah berjaya di masa silam tentang hal ini, tentang kenapa DPR tidak mau memperdulikan nasib rakyat. Pertanyaan saya dijawab dengan pertanyaan lagi: "Lho, apakah masyarakat punya keperdulian kepada nasib kami setelah tidak jadi anggota dewan?" Itulah sebabnya dari awal ia sudah berbulat tekad akan memanfaatkan empat tahun kedudukannya sebagai anggota Dewan untuk mencari uang sebanyak-banyaknya".

Fenomena perpolitikan nasional lebih khusus lagi lembaga legislatif telah berkembang jauh ke arah *image* yang jelek semacam itu, mungkinkah kiai yang menjadi anggota DPRD/DPRRI tidak ikut hanyut dalam permainan dahsyat menculusi kehormatan rakyat dengan bertindak menomorsatukan sekian kepentingan pragmatisme pribadi dan kepentingan sepihak dari partainya? Jawabannya tentu sangat tak terbayangkan!

Keempat, sektor ekonomi. Lembaga apa pun yang dikelola oleh siapa pun pasti memerlukan sejumlah dana operasional. Lembaga pendidikan pesantren demikian pula kalau tidak ditopang dengan dana yang cukup memadai pastilah sulit berkembang pesat. Kiai sebagai pemimpin harus kreatif mencari sektor pendanaan. Lembaga pesantren akan lebih bagus lagi jika memiliki unit usaha kerja yang bisa mendatangkan *income* rutin setiap bulan, misalnya memiliki usaha dagang grosiran atau memiliki saham di beberapa pom bensin.³⁵

³⁵Misalnya, sejak tahun 2002 lembaga PP Al-Amien Prenduan, Sumenep, Madura memiliki sekian persen saham di Pom Bensin Talang Pamekasan (usaha bisnis yang direktornya dipegang oleh H. Nurkhalish, Kapedi, Bluto,

Sebuah lembaga pendidikan pesantren jika secara internal mempunyai usaha ekonomi yang kuat (mapan), maka secara eksternal tatkala berhadapan dengan sekian raksasa ekonomi kapitalistik diduga kuat lembaga itu tak akan mudah ditaklukkan. Artinya, kalau pun raksasa ekonomi kapitalistik itu mengajak kerjasama, MoU (*Memorandum of Understanding*) yang akan ditandatangani oleh kedua belah pihak akan diformat setara (saling menguntungkan) dan tidak menyimpan makna imperialisme yang terselubung.

Lembaga pendidikan pesantren dalam spektrum itu sudah saatnya juga mencermati pergulatan perekonomian bangsa dan bagaimana dampaknya terhadap kehidupan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Lembaga pesantren di Indonesia hampir sebagian besar terletak di daerah pedesaan. Masyarakat sekitar lembaga selalu saja ada yang secara ekonomi sangat menderita sampai ketika berbuka puasa di bulan Ramadhan hanya berbuka dengan air putih dan nasi putih tanpa lauk pauk. Kondisi semacam itu juga disebabkan oleh krisis moneter (dimulai pertengahan Juli 1997) yang berlarut-larut di Indonesia sehingga harga kebutuhan pokok sehari-hari tidak bisa ditekan ke level rendah sesuai dengan kemampuan mayoritas rakyat negeri ini.

Lembaga pendidikan pesantren harus memperluas peranan strategisnya bagi pelayanan kehidupan masyarakat di sekitarnya. Lembaga ini perlu memberi contoh tentang pentingnya mendirikan BAZIS (Badan Amil Zakat Infak dan Shadaqah), agar bisa memberi

Sumenep). Usaha bisnis ini sangat strategis bagi pendanaan lembaga pesantren kini dan di masa depan.

keteladanan kepada masyarakat mengenai akhlak sifat pemurah, peduli dan empatik, serta begitu buruknya sifat bakhil atau kikir.

Penutup

Pola baru konsep manajemen pendidikan berbasis sekolah atau SBM (*School Based Management*) seperti pesantren tersebut secara konseptual-operasional menggunakan pendekatan sistem *input – process – output*. Salah satu strategi yang bisa digunakan pada sistem pendidikan pesantren adalah menggunakan metode *SWOT (Strength – Weakness – Opportunities – Threat)* sebagai upaya menghasilkan temuan yang realistis untuk ditindaklanjuti. Pendidikan pesantren juga sangat membutuhkan kejujuran para pengelola dan *stakeholder*. Dimensi kejujuran adalah sesuatu yang sangat mahal, sebab walaupun lembaga pendidikan pesantren dikenal sebagai lembaga berbasis ajaran Islam, belum tentu mental kejujuran dapat tumbuh berkembang secara baik dan merata. Metode *SWOT* bisa menjadi teropong dalam membedah secara transparan dan jujur keberadaan lembaga apa adanya, terutama dalam mengevaluasi enam matra *minus* yang mengiringi keberadaan lembaga pesantren. Lembaga pendidikan pesantren semestinya memperluas peranan strategisnya bagi pelayanan kehidupan masyarakat di sekitarnya secara optimal. Lembaga pesantren memiliki prospek yang sangat bagus sebagai sistem pendidikan alternatif dengan mengusung tujuh matra *plus* yang diembannya.

Daftar Pustaka

- Anshari, Endang Saifuddin. *Ilmu, Filsafat dan Agama*. Cetakan ke-8, Surabaya: Bina Ilmu, 1990.
- Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900 – 1942*, Cetakan Pertama, Jakarta: LP3ES, 1980.
- Djauhari, K. H. Moh. Idris, *Pola Umum Pendidikan Sistem Mu'allimin*, Cetakan ke-1, Prenduan: PP Al-Amien, 2000.
- Fadjar, Abdullah. *Peradaban dan Pendidikan Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 1991.
- Ghazâlî, Abû Hâmid al-. *Ihyâ 'Ulûm al-Dîn*. Cairo: Dar al-Sya'b, t.t..
- Hakim, M. Arief, "Korupsi sebagai Gaya Hidup", *Harian Republika*, Edisi Rabu, 10 September 2003.
- Hasan, A. Rifa'i, et al. (ed.). *Perspektif Islam dalam Pembangunan Bangsa*. Yogyakarta: PLP2M, 1987.
- Madjid, Nurcholish. *Memberdayakan Masyarakat Menuju Negeri yang Adil, Terbuka, dan Demokratis*. Jakarta: Paramadina, 1996.
- Magnis Suseno, Frans. *Filsafat sebagai Ilmu Kritis*. Cetakan ke-9, Yogyakarta: Kanisius, 2002.
- Mastuhu. *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren: Suatu Kajian tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren*. Jakarta: INIS, 1994.
- Muhammad Naufal, Abu Ahmad. *Do'a-do'a Mustajab dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits*. Cetakan ke-11, Yogyakarta: LekPIM, 2002.
- Mulkhan, Abdul Munir. *Paradigma Intelektual Muslim: Pengantar Filsafat Pendidikan Islam dan Dakwah*. Yogyakarta: Sypress, 1993.

- Oepen, Manfred & Karcher, Wolfgang (ed.). *Dinamika Pesantren: Dampak Pesantren dalam Pendidikan dan Pengembangan Masyarakat*. Jakarta: P3M, 1988.
- Pidarta, Made. *Perencanaan Pendidikan Partisipatori dengan Pendekatan Sistem*. Cetakan ke-2. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Rahman, Jalaluddin. *Konsep Perbuatan Manusia Menurut al-Qur'an: Suatu Kajian Tafsir Tematik*. Cetakan ke-2. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Ramzy, A. Naufal (ed.). *Islam dan Transformasi Sosial Budaya*. Jakarta: Deviri Ganan, 1993.
- Slamet, dkk. *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*. Cetakan ke-2, Jakarta: Direktorat Pendidikan Menengah Umum Departemen Diknas, 2000.
- Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah*, Cetakan ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Yatim, Badri et al. (Ed.). *K.H. Imam Zarkasyi di Mata Umat*. Gontor Ponorogo: Gontor Press, 1996.
- Jurnal dan Majalah**
- Buchori, Mochtar. "Pendidikan Islam di Indonesia: Problema Masa Kini dan Perspektif Masa Depan." *PRISMA*, No. 5 Tahun XVIII (1989).
- Dhofier, Zamakhsyari. "Tradisi Pesantren: Studi Tentang Peranan Kiai dalam Memelihara dan Mengembangkan Ideologi Islam Tradisional." *PRISMA*, No. 2 Tahun X (Februari 1981).
- , "Transformasi Pendidikan Islam di Indonesia," *PRISMA*, No. 2 Tahun XV (1986).
- J.A., Denny. "Pemecatan Massal Anggota DPR", *HU Republika*, Kamis, 17 Juli 2003.
- Massardi, Adhie M. "Setan Melingkar di Gedung Senayan", *Koran Tempo*, Senin, 30 Juni 2003.
- Mas'udi, Masdar F. "NU & Teologi al-Asy'ârî: Kajian Melalui al-Ibânah 'an Ushûl al-Diyânah." *Majalah Pesantren*, No. 4 Vol. III (1986).
- Nasution, Armin. "Santri: Orang Kota-Pedesaan," *Majalah Pesantren*, No. 1 Vol.VI (1989).
- Siraj, A. Malthuf. "Ma'had 'Aly Sukorejo: Semangat Akademis di Pesantren Salafiyah," *Majalah Pesantren*, No. 3 Vol.VIII (1991).
- Yafie, Ali, dan Hasan, Muhammad Tholhah. "Kitab Kuning Produk Peradaban Islam, Metode Pengajian Kitab di Pesantren: Tinjauan Ulang," *Majalah Pesantren*, No. 1 Vol.VI (1989).

